

LAMPUNG SAI

VOLUME 4 2023



Penerimaan CASN Kemenkumham 2023 *Mencari SDM unggul berakal budi luhur*

**5188 Peserta Ikuti
SKD Tilok Lampung**

Kakanwil Sorta Pastikan Berjalan
Transparan, Aman dan Tertib

**SKB Kesamaptaan
Gandeng Brimob**

Peserta Seleksi Harus Siapkan
Fisik dan Mental Prima



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**

bangga
melayani
bangsa

KAMI ASN KEMENKUMHAM
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, Cekatan, Solutif dan dapat Diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

➤ Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

➤ Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi & Negara.
3. Menjaga Rahasia jabatan & negara.

➤ Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi & mengembangkan kreativitas.
3. Bertindak proaktif.

➤ Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

Dari Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Pada Volume 4 Tahun 2023 ini kami sajikan liputan khusus tentang Penerimaan CPNS Kemenkumham Tahun 2023.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan selalu kami terima dengan sambutan hangat agar Buletin Lampung Sai semakin baik dan semakin PASTI. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!



Diterbitkan oleh: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung | **Pelindung:** Kepala Kantor Wilayah | **Pengarah:** Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian | **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian Program dan Humas | **Pemimpin Redaksi:** Kepala Sub Bagian Humas RB & TI | **Tim Redaksi dan Redaktur Foto :** Damba Wiratama, Reza Khairulfitra, Rizqi D. Wardhanik, Nabil An Nafis, Odi Dewangga Y., M. Yusuf, Galang Syaelendra, Novriko D. Sanjaya | **Desain Grafis dan Layout:** Nabil An Nafis

Daftar Isi



Liputan Khusus



08

Seleksi CPNS
Kemenkumham T.A. 2023



Liputan Khusus



16

Peserta Berkompetisi
Dalam SKB Kesamaptaan



22

Unjuk Kemampuan di
SKB WPFK, Peserta All
Out Berikan yang Terbaik



Topik Utama



23

Apel Siaga Satopspatnal 3 Plus 1, Pelayanan dan Pengamanan Pemasyarakatan & Sukses Pemilu 2024



30

Penguatan Intelijen Pemasyarakatan oleh Dirkamtib



32

Kanwil Kemenkumham Lampung, Donorkan Puluhan Kantong Darah Ke PMI



Topik Utama



34

Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham, Momentum untuk Menghargai Dan Bersyukur



Topik Utama



40

Penghargaan Kabupaten/ Kota Peduli HAM



46

73 WBP di Lampung Terima Remisi Khusus Natal

Kamu Harus Tahu



48

Warga Binaan Pemasarakatan Bisa Nyoblos Saat Pemilu



Seleksi CPNS Kemenkumham T.A. 2023



09/11

I Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui Computer Assited Test (CAT) di wilayah Kemenkumham Lampung dimulai. Segel secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sorta Delima L Tobing didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi M.Ikmal Idrus; Kepala Divisi Pemasarakatan, R.B. Danang Yudiawan; Kepala Bagian Umum,

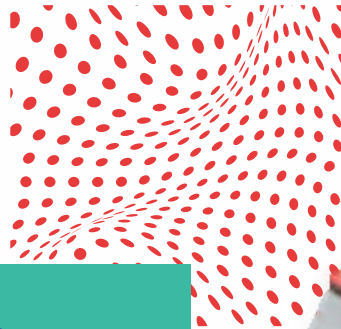
Denial Arief; dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan Rumah Tangga, Deni Usmansyah dengan disaksikan oleh perwakilan BKN, Muhammad Syafiq dan Perwakilan Biro Kepegawaian, Anwar Siregar serta perwakilan Ombudsman, Upi Fitriyanti. Pelaksanaan Tes SKD kali ini bertempat di Ballroom Hotel Amalia Bandar Lampung, Kamis (09/11).



RESMI BUKA TES SKD CPNS 2023 HARI PERTAMA,

Kakanwil Sorta Pastikan Berjalan Transparan, Aman, Dan Tertib

Sebelum sesi pertama dimulai Kepala Kantor Wilayah, Sorta Delima L. Tobing memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta tes untuk berupaya semaksimal mungkin, selalu berdoa, dan mengutamakan kejujuran.



Laksanakan tes dengan semangat fokus dan jujur, jangan ada kecurangan, percaya akan kemampuan diri sendiri, apabila terbukti melakukan kecurangan akan langsung didiskualifikasi.

Sorta Delima L. Tobing
Kakanwil Kemenkumham Lampung



Dilanjutkan dengan pembekalan oleh Ketua Koordinator BKN, Muhammad Syafiq menjelaskan bahwa pada tahun ini pelaksanaan SKD menggunakan aplikasi CAT OS dengan keamanan yang lebih mumpuni dan meminimalisir kecurangan oleh peserta. Pelaksanaan tes akan berlangsung selama 100 menit dengan total 110 soal meliputi TWK 30 Soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Nilai kumulatif tertinggi SKD 2023 adalah 550 apabila peserta ujian berhasil mencapai nilai maksimal 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP.

Usai memberikan pembekalan selanjutnya Sorta berkeliling melakukan pengecekan seluruh Area Tes, dimulai dari area Pemeriksaan Dokumen, Penitipan Tas, Pemeriksaan Badan, Penerimaan PIN serta Area Steril sebelum peserta memasuki ruangan. Selain itu, Sorta berpesan kepada seluruh jajaran Panitia agar selalu terus bersemangat dalam menjalani tugas yang sedang diamanahkan yaitu sebagai Panitia Daerah. Sorta juga mengingatkan agar terus teliti namun tetap dengan sikap yang humanis pada seluruh peserta.

◀ Kakanwil Sorta saat membuka pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham

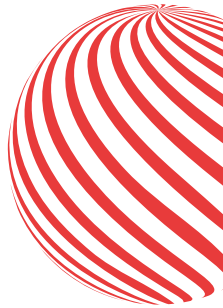


▲ Koordinator Tim Pelaksana CAT BKN, Muhammad Syafiq memberikan sambutan

Kami dari Tim BKN mengharapkan peserta semuanya taat prosedur, menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan ujian, tetap juga tenang, dan tidak membawa alat bantu apapun saat ujian.

Muhammad Syafiq
Koordinator Tim Pelaksana CAT BKN

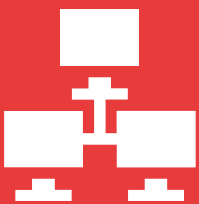
PELAKSANAAN SKD CPNS 2023 LOKASI TES PROV. LAMPUNG



5188 Peserta



9-18 November
2023



35 Sesi Computer
Assisted Test



Kakanwil Sorta membuka segel
ruangan tempat pelaksanaan SKD



Proses SKD berlangsung dengan pengawasan ketat dari panitia. Tak hanya mengawasi, mereka juga memberikan informasi terperinci tentang tata cara pengerjaan Computer Assisted Test (CAT) sesuai peraturan BKN kepada para CASN, menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakan soal ujian.

Selain itu, turut diterapkan juga fitur identifikasi dan autentikasi wajah atau yang kita kenal sebagai Face Recognition. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kecurangan, termasuk upaya joki sehingga memastikan keabsahan proses SKD.

Sebelum memulai tes, para peserta melewati serangkaian prosedur, termasuk penitipan barang, pemeriksaan badan, dan menunggu di ruang tunggu steril sebelum memasuki ruangan tes CAT. Ruangan tersebut dilengkapi dengan video informasi mengenai syarat dan ketentuan SKD CASN Kemenkumham Lampung.



Panitia melakukan *body checking* dengan metal detector ▶



HARI TERAKHIR

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun Anggaran 2023 tiba di hari kesepuluh yang merupakan hari terakhir. Sabtu, (18/11/2023).

Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, rangkaian seleksi yang berlangsung sejak 9 November 2023 itu berjalan tertib dan lancar.

Kepala Divisi Administrasi M.Ikmal Idrus, menyampaikan rasa terima kasih atas jerih payah jajaran



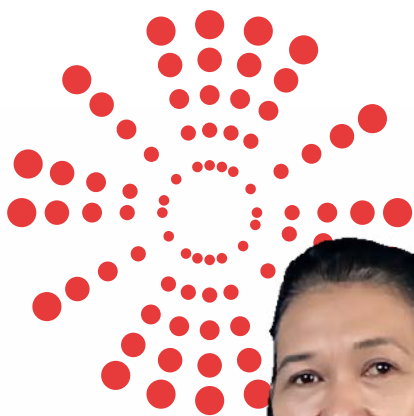
Serah terima berita acara pelaksanaan SKD ►
Kemenkumham titik lokasi Lampung

panitia yang telah bertugas selama sepuluh hari tanpa libur. Ikmal berharap melalui proses seleksi ini dapat melahirkan calon Insan Pengayoman yang berkualitas dan berintegritas.

Pada tahap SKD, peserta diharuskan memperoleh nilai di atas ambang batas (passing grade) dan masuk dalam peringkat terbaik, sesuai dengan Keputusan Menpan RB Nomor 651 Tahun 2023. Jumlah penerimaan di Kanwil Lampung mencakup 34 orang untuk Penjaga Tahanan Pria, dan 102 orang CASN yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).



▲ Kepala Bagian PSIK dan Tata Usaha Biro Kepegawaian Kemenkumham Reza Aditiya Ananda, ikut memantau jalannya SKD pada hari terakhir



Pelaksanaan terakhir SKD ini juga dihadiri secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Sorta Delima

Lumban Tobing. Kakanwil Sorta mengungkapkan keahadirannya sebagai bentuk dukungan kepada para peserta sebelum mereka melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu SKB.

Selain itu, Kepala Bagian PSIK dan Tata Usaha Biro

Kepegawaian Kemenkumham Reza Aditiya Ananda, ikut memantau jalannya SKD pada hari terakhir. Ia memastikan seluruh aspek dalam proses SKD CASN Kemenkumham Lampung berlangsung dengan bersih dan lancar.

Dari keseluruhan peserta SKD CASN Kanwil Kemenkumham Lampung, Muhammad Irfan mencatatkan diri sebagai peraih skor tertinggi (top score) dengan nilai 489 untuk formasi penjaga tahanan pria. Hasil ini dapat diakses secara real-time dan transparan melalui kanal YouTube Official CAT BKN.

92 Peserta Berkompetisi

Dalam SKB Kesamaptaan





10/12

Berempat di Stadion Pahoman Bandar Lampung, Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tingkat SLTA dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 resmi diselenggarakan. Minggu, (10/12/2023).





SKB Kesamaptan dihadiri oleh Kakanwil Sorta Delima Lumban tobing. Turut hadir dan mengawasi kegiatan Kadivmin M.Ikmal Idrus, Kadivpas RB Danang Yudiawan, Panitia Pengawas Erbata Sri Muliatini (Auditor Madya Inspektorat Wilayah VI), Jajaran Panitia Pusat, jajaran panitia daerah Kanwil Kemenkumham Lampung serta Satuan Brimob Polda Lampung, sebanyak 92 peserta hadir dari total 102 peserta SKB Kesamaptan.

Membuka jalannya seleksi, Kakanwil Sorta dalam arahnya menyampaikan kepada seluruh peserta seleksi untuk selain menyiapkan fisik, para peserta pula harus mempersiapkan mental dan jangan lupa berdoa kepada tuhan.



▲ Pengukuran tinggi badan peserta dengan alat ukur yang sudah ditera

Saya berpesan kepada seluruh peserta semua untuk memiliki akal budi luhur, karena dengan menggunakan cara luhur akan memberikan hasil yang luhur, Jangan ciderai usaha panitia dengan niat dan usaha yang tidak baik karena dipastikan akan terbongkar

Sorta Delima L. Tobing
Kakanwil Kemenkumham Lampung

Kakanwil Sorta menekankan kepada para peserta untuk mengedepankan akal budi luhur dan menjaga kejujuran selama seleksi berlangsung.

“Selama pelaksanaan tes, saya berpesan kepada seluruh peserta semua untuk memiliki akal budi luhur, karena dengan menggunakan cara luhur akan memberikan hasil yang luhur. Jangan ciderai usaha panitia dengan niat dan usaha yang tidak baik karena dipastikan akan terbongkar,” ujar Kakanwil Sorta saat memberikan arahan.





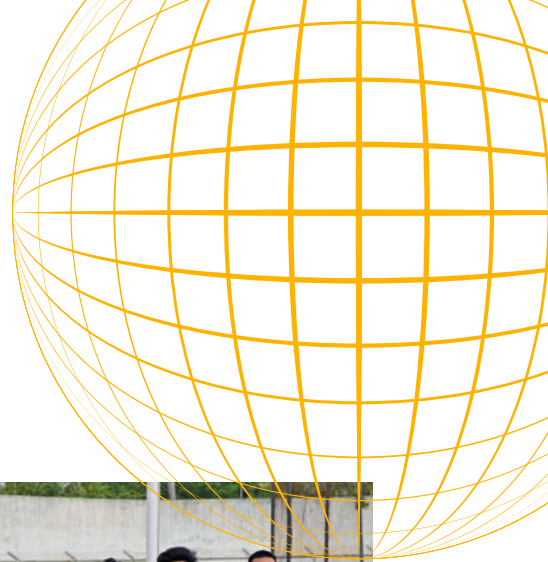
▲ Panitia melakukan pemeriksaan identitas peserta SKB Kesamaptaan

Kakanwil Sorta juga menjelaskan bahwa alat ukur selama tes telah di tera agar tes tetap akuntabel, Kakanwil menambahkan untuk para peserta yang masih memiliki keberatan terhadap penilaian agar kritis untuk segera menyanggah kepada panitia sebelum menandatangani dokumen, hal itu guna kedepannya tidak ada hal-hal yang menimbulkan miss komunikasi.

Selanjutnya, para peserta memulai tahapan demi tahapan dari registrasi, pengelompokan peserta, pengukuran tinggi badan, pengukuran tensi darah, pemanasan sebelum memulai Kesamaptaan A dan Kesamaptaan B. Kesamaptaan A meliputi Lari selama 12 Menit dan Kesamaptaan B meliputi Pull Up, Sit Up dan Push Up dengan masing-masing uji diberikan maksimal waktu 1 menit, test SKB Kesamaptaan ini diakhiri dengan Shuttle Run sebanyak 3 putaran



ALUR SKB KESAMAPTAAN



KESAMPTAAN A



 lari
12 menit



KESAMPTAAN B



 pull-up
1 menit



 push-up
1 menit



 sit-up
1 menit



 shuttle run
3 putaran



Unjuk Kemampuan di SKB WPFK

Peserta All Out Berikan yang Terbaik

Kanwil Kemenkumham Lampung, gelar seleksi kompetensi bidang Wawancara, Pengamatan Fisik, dan Keterampilan (WPFK) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil pada Jumat, 22 Desember 2023.

90 peserta seleksi WPFK bersaing dan berjuang untuk menonjolkan dan memberikan kemampuan terbaik mereka di hadapan pengujian maupun jajaran panitia pusat dan daerah.

Rangkaian seleksi dimulai dengan pemeriksaan identitas peserta, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Setelah itu, Panitia melakukan pemeriksaan fisik, tindak, dan tato kepada para peserta.

Sebelum dimulainya sesi wawancara, meja pengujian diundi secara terbuka di hadapan perwakilan peserta seleksi. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk menegaskan bahwa proses seleksi dikelola dengan prinsip bersih, transparan, dan akuntabel.

Tim pengujian terdiri dari Kakanwil Sorta Delima Lumban Tobing, Kadivpas RB Danang Yudiawan, Kadivmin M.Ikmal Idrus, Kabag Akuntansi dan Pelaporan Biro

peserta SKB WPFK menunjukkan kemampuan yang dimiliki di hadapan pengujian ▶

Keuangan, Anna Ernita serta Kabag Kepegawaian Sekretariat Ditjenpas, Decky Nurmansyah.

Dalam setiap sesi wawancara, peserta diberikan waktu 10 menit untuk menampilkan potensi terbaik mereka, baik dari segi hard skill maupun soft skill. Tujuan dari tahapan WPFK ini adalah untuk menggali dan mengevaluasi potensi serta kemampuan kandidat.

Tahapan WPFK ini merupakan akhir dari rangkaian seleksi CPNS Kemenkumham Tahun 2023. Diharapkan hasil seleksi ini dapat menjangkau insan Pengayoman yang profesional, tangguh, dan berintegritas.





◀ Penguji SKB WPFK, dari panitia pusat dan daerah



▲ Kakanwil Sorta saat menguji peserta SKB WPFK



APEL SIAGA SATOPSPATNAL 3 PLUS 1

Pelayanan dan Pengamanan
Pemasyarakatan & Sukses Pemilu 2024





31/10

Dalam rangka pelayanan dan pengamanan pemasyarakatan serta sukses pemilu 2024, Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Supriyanto pimpin apel siaga satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal) 3 plus 1 bertempat di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung. Selasa, (31/10/2023).

Apel siaga dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung Sorta Delima Lumban Tobing, Kadivmin M.Ikmal Idrus, Kadivpas RB Danang Yudiawan, Kadiv Keimigrasian Tato Juliandi H, Jajaran Kepala Satker dilingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung, para peserta apel dan juga tamu undangan dari Stakeholder terkait.

Sebagai insan pengayoman serta petugas pemasyarakatan wajib mempersiapkan segala sesuatunya agar rangkaian kegiatan pemilu di dalam Lapas maupun Rutan di Provinsi Lampung ini, dapat berjalan dengan aman, damai dan tertib

Supriyanto

Direktur Keamanan dan Ketertiban



Dalam apel, Dirkamtib Supriyanto menyampaikan bahwa tidak lama lagi yaitu pada bulan Februari 2024 Negara Kita akan melaksanakan Pemilu. Pemilu tahun 2024 ini adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa.

Dirkamtib menambahkan agar potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas atau Rutan harus menjadi perhatian khusus, agar upaya kelompok atau orang tertentu yang ingin mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas atau Rutan selama Pemilu 2024, dapat dicegah dan digagalkan.



▲
Apel siaga diikuti oleh seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan



▲
Pembacaan Ikrar Netralitas ASN oleh petugas



▲
Penampilan yel-yel penyemangat dari peserta Apel Siaga

Terkait pelayanan, Dirkamtib mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengimplementasikan pedoman 3 Plus 1 untuk pemasyarakatan maju yaitu melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berantas narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum.

Dalam rangkaian apel siaga turut dilakukan penyematan pita merah putih secara simbolis oleh Dirkamtib dan Kakanwil kepada peserta apel dan juga ditampilkan atraksi bela diri oleh Ksatria Kempo Kanwil Lampung serta penampilan Yel-yel Satopspatnal. Rangkaian kegiatan apel siaga pada hari ini ditutup dengan sesi foto bersama.





Saya berharap setelah diadakannya kegiatan apel siaga ini, Kita sebagai petugas pemasyarakatan dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar, makin eratnya koordinasi dengan stake holder terkait, serta menjadi bagian dari salah satu komponen bangsa yang turut serta dalam menyukseskan Pemilu tahun 2024

Supriyanto

Direktur Keamanan dan Ketertiban



PENGUATAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM Lampung
Gelar Penguatan Intelijen
Pemasyarakatan oleh Direktur
Keamanan dan Ketertiban
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
di Jajaran Kementerian Hukum
dan HAM Lampung, Selasa
(31/10/2023) . Kegiatan ini dibuka
langsung oleh Kepala
Kantor, Dr.
Sorta Delima
Lumban
Tobing
serta
dihadiri
oleh

Kepala Divisi Pemasyarakatan,
R.B. Danang Yudiawan;
Pejabat Administrator dan
Pengawas, Seluruh Kepala UPT
Pemasyarakatan se-Provinsi
Lampung dan Para Pejabat
Pengawas Keamanan dan
Ketertiban serta KPLP/KPR.

Dalam sambutannya, Sorta
berharap dalam kegiatan kali ini
dapat menghasilkan output terbaik
terhadap pelayanan tahanan,
pembinaan, pembimbingan
kemasyarakatan, perawatan,
pengamanan, pengamatan, dan
pengelolaan oleh seluruh unsur
pemasyarakatan.

“Untuk itu, Pada
kesempatan yang baik ini,
saya secara pribadi
sekaligus

mengatasnamakan organisasi,
menaruh harapan dan
kepercayaan penuh kepada
saudara-saudara seluruh Jajaran
Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Lampung dapat memitigasi
potensi gangguan keamanan dan
ketertiban pada Lapas – Rutan
agar upaya kelompok atau orang
tertentu yang ingin mengganggu
stabilitas keamanan dan ketertiban
di Lapas-Rutan selama Pemilu
2024, dapat dicegah dan
digagalkan.” Pesan Sorta.

Selanjutnya masuk
dalam penguatan oleh Direktur
Keamanan dan Ketertiban
Supriyanto yang menyampaikan
terkait Ruang Linkup Intelijen,
Penyelenggaraan dan Kegiatan
Intelijen sesuai dengan Dasar
Hukumnya.

Dirkamtib Supriyanto
juga menjelaskan bahwa tujuan
pelaksanaan Intelijensi ini
untuk melakukan deteksi
dini dan memberikan
peringatan dini sebagai
bahan pertimbangan
pengambilan
kebijakan di bidang



Di luar koordinasi dengan KOMINPUS dan KOMINDA, pelaksanaan intelijen pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah daerah, dan/atau Orang, organisasi atau badan, atau kelompok masyarakat. Kerja sama di bidang Intelijen Pemasyarakatan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Supriyanto
Direktur Keamanan dan Ketertiban

Pemasyarakatan serta berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Di luar koordinasi dengan KOMINPUS dan KOMINDA, pelaksanaan intelijen pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah daerah, dan/ atau Orang, organisasi atau badan, atau kelompok masyarakat. Kerja sama di bidang Intelijen Pemasyarakatan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pesan Dirkamtib dalam penguatannya tentang Intelijen.



Kanwil Kemenkumham Lampung

Donorkan Puluhan Kantong Darah Ke PMI

Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan dalam rangka berbagi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan kegiatan donor darah . Rabu (25/10/2023).

Bertempat di ruang legal drafter, kegiatan donor darah merupakan kegiatan sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Kegiatan ini bukan pertama kali dilakukan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung, namun dilaksanakan secara rutin.

Kegiatan donor darah pada hari ini berkerja sama dengan UPTD PMI Bandar Lampung yang dihadiri oleh lima orang tim petugas tenaga kesehatan dan didampingi oleh Dokter Madya Kanwil Lampung dr. Nathalia Christina Simanungkalit.



Kegiatan yang bertema “Kanwil Kumham Lampung Peduli, Kanwil Kumham Lampung Berbagi” tersebut diikuti Pejabat Administrator dan Pengawas serta para pegawai kantor wilayah . Sejak dimulainya kegiatan, nampak para pegawai antusias mengikutinya.

Donor Darah pada hari ini berhasil mendapatkan sebanyak 45 kantong darah. Diharapkan kegiatan dapat terus dilaksanakan kedepannya, disamping baik untuk kesehatan juga dapat membantu sesama kita yang membutuhkan darah dan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh.



◀ Petugas PMI saat memeriksa pendonor darah





SEKARANG,

saatnya kita memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius untuk mendatangi.

dan demikian, kita dapat memastikan pertumbuhan berkembang secara profesional.



Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham,

MOMENTUM UNTUK

MENGHARGAI DAN BERSYUKUR

14/12

Jakarta - Sepanjang tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melewati berbagai tantangan. Ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada

pula yang menjadi pembelajaran. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut saat ini merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2023 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai

Yasonna H. Laoly
Menteri Hukum dan HAM RI



"Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai," kata Yasonna dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

Hari ini, lanjut Yasonna, kita berkumpul untuk merayakan momen refleksi akhir tahun, sebuah waktu yang

berharga untuk meninjau perjalanan kita setahun terakhir. Sudah selayaknya kita mendekati setiap pencapaian dengan rasa syukur yang mendalam, dan mendekati setiap kegagalan dengan sikap belajar yang positif.

"Kita harus mengakui bahwa setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras," ujarnya, Kamis (14/12/2023) pagi.

Sekarang saatnya seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang.

Namun terkadang kita malah membuat target yang lebih medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas. Yasonna menekankan hal terpenting adalah membuat target yang visioner, yang jauh kedepan, dan kalau kita dapat mencapainya

akan merasa lebih puas.

“Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” ucapnya di Hotel Borobudur Jakarta.

Sebelumnya Ketua Steering Committee Rakor, Y. Ambeg Paramarta mengatakan pada rakor ini telah menghasilkan 52 rencana

aksi, rinciannya adalah 10 Rencana Aksi Dukungan Manajemen, 2 Rencana Aksi Pemasarakatan, 23 Rencana Aksi Keimigrasian dan 17 Rencana Aksi Pelayanan Hukum dan HAM.

Dalam kegiatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan, baik kepada unit kerja internal maupun kementerian/lembaga (K/L) lain. Diantaranya adalah penghargaan Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori I Tingkat K/L yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.



Penghargaannya lainnya adalah diberikannya penghargaan kepada 67 satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkumham tahun 2023, yang terdiri dari 2 unit utama, 7 kanwil, 12 rumah tahanan negara, 8 kantor imigrasi, 17 lembaga pemasyarakatan, 1 lembaga pemasyarakatan terbuka, 2 lembaga pemasyarakatan khusus anak, 3 lembaga pemasyarakatan perempuan, 3 lembaga pemasyarakatan narkotika, 1 lembaga pemasyarakatan pemuda, 3 rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan 8 balai pemasyarakatan.

Rencana aksi (ini) akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi di pusat dan kantor wilayah.

Y. Ambeg Paramarta
K Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia





2 SATKER LAMPUNG

RAIH PREDIKAT WBK

Penghargaan WBK diberikan secara langsung oleh Menkumham Yasonna H. Laoly kepada dua satker, yaitu Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang diwakili oleh Kepala Lapas Putranti Rahayu,

dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang diwakili oleh kepala Kanim Indra Bangsawan. Pencapaian ini mencerminkan upaya serius Kanwil Kemenkumham Lampung dalam menjaga integritas dan memberikan

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Semoga penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi positif bagi kemajuan Kanwil Kemenkumham Lampung.





Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM

Diserahkan Langsung oleh Kakanwil
dan Gubernur Lampung



22/12



Dalam rangka perwujudan hasil sinergitas kerja sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Provinsi Lampung.

Menghadiri kegiatan dari Kanwil Kemenkumham Lampung, Kakanwil (Dr. Sorta Delima Lumban Tobing), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Agvirta Armilia Sativa), Kepala Bidang HAM (Basnamara), dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Ferie Irza Irawan) yang bertempat di kediaman Gubernur Lampung (Mahan Agung).



▲
Pemerintah Provinsi Lampung mendapat penghargaan sebagai Provinsi Peduli HAM

Membuka acara, Kakanwil Kemenkumham Lampung, Dr. Sorta menyampaikan bahwa predikat yang diberikan dalam rangka peringatan hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-75 Tahun 2023 ini dinilai berdasarkan 10 (sepuluh) indikator.

“Hak atas bantuan hukum, Hak atas informasi, Hak turut serta dalam pemerintah, Hak atas keberagaman dan pluralisme, Hak atas kependudukan, Hak atas Kesehatan, Hak atas Pendidikan, Hak atas pekerjaan, Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan Hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak” Ucap Dr. Sorta

Sorta juga menyampaikan sebanyak 12 (dua belas) Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung yang memperoleh nilai diatas 75 (tujuh puluh lima) dari hasil penilaian panitia pusat.



”

Dengan berhasilnya 12 kabupaten/kota dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung memperoleh predikat kabupaten/kota peduli HAM, lebih dari 60%, maka Provinsi Lampung secara otomatis juga meraih Provinsi berpredikat Peduli Hak Asasi Manusia

Sorta Delima L. Tobing ➤
Kakanwil Kemenkumham Lampung



Kakanwil Sorta dan Gubernur Arinal berfoto bersama dengan kepala daerah penerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM

"Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan" Jelas Dr. Sorta

"Dengan berhasilnya 12 kabupaten/kota dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung memperoleh predikat kabupaten/kota peduli HAM, lebih dari 60%, maka Provinsi Lampung secara otomatis juga meraih Provinsi berpredikat Peduli Hak Asasi Manusia" Tegas Kakanwil dihadapan para Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam Kabupaten/Kota Peduli HAM dan ditutup dengan sambutan dari Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi yang menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung atas apresiasi yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya-upaya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota

Peduli HAM di Provinsi Lampung. Menurut Arinal, Pemerintah Daerah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan P5HAM di daerah khususnya dan nasional pada umumnya.

"P5HAM merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk menjamin HAM setiap warga negara Indonesia, sehingga melalui Kabupaten/ Kota peduli HAM harapannya implementasi P5HAM menjadi keniscayaan dengan tolok ukur yang jelas dan sistematis" Tegas Arinal

Sebelum menutup sambutan Arinal menyampaikan, "Selain itu, kami harap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meneruskan semangatnya dalam melaksanakan program-program pemerintah lainnya di Tahun 2024 seperti melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan mendorong peningkatan pertumbuhan desa sadar hukum." Ucap Arinal

”

kami harap Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat meneruskan semangatnya dalam melaksanakan program-program pemerintah lainnya di Tahun 2024 seperti melaksanakan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan mendorong peningkatan pertumbuhan desa sadar hukum

Arinal Djunaidi ➤
Gubernur Lampung





Kanwil Kemenkumham Lampung

73 WBP di Lampung Terima Remisi Khusus Natal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan Remisi Khusus (RK) Natal kepada 15.922 narapidana Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia pada Hari Natal Tahun 2023, Senin (25/12). Dari jumlah tersebut,

15.823 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian dengan rincian 3.038 orang menerima remisi 15 hari, 10.871 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 1.404 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan

remisi untuk 510 narapidana.

Sementara itu, 99 orang menerima RK II atau langsung bebas, dengan rincian 37 narapidana menerima pengurangan masa pidana 15 hari, 53 orang menerima remisi 1 bulan, 4 narapidana menerima remisi 1 bulan 15 hari, dan 5 narapidana menerima remisi 2 bulan.





Sebanyak 6 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung memperoleh remisi atau pengurangan masa hukuman pada perayaan Natal Tahun 2023. Penyerahan dilaksanakan secara simbolis oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Totto Juliadin Hidayawan, kepada perwakilan warga binaan.

Putranti Rahayu. Dari 6 orang warga binaan tersebut, 5 orang mendapat remisi 1 bulan, dan 1 orang memperoleh remisi 15 hari.

Acara penyerahan remisi khusus dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Divisi Pemasyarakatan R.B Danang Yudiawan R dan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

Tema Natal tahun 2023 yaitu "Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera Di Bumi" dikutip dari ayat Alkitab Lukas 2:14. Tema ini membawa makna yang dalam bagi umat kristiani di seluruh Indonesia. Natal bukan hanya perayaan tentang kelahiran Yesus, tetapi juga peristiwa dimana kehadiran-Nya menjadi penanda sukacita.





Warga Binaan Pemasyarakatan Bisa Nyoblos Saat Pemilu?

Apakah punya hak pilih?

pelajari lebih lanjut! ➤

Hak Pilih Dijamin Undang-Undang

Undang-undang menjamin hak pilih setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih pada pemilihan umum (Pemilu)

*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia*

*Lalu bagaimana dengan Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lapas
atau Rutan? Apakah boleh memilih juga?*

Tentu saja WBP juga memiliki hak pilih, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan*



Apa Syaratnya?

WBP berhak mengikuti pemungutan suara di TPS jika memenuhi persyaratan:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022
Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih*

Yuk Kenali Jenis Surat Suara

5 jenis surat suara di Pemilu 2024

- 1. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden **ABU-ABU**
- 2. Surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) **MERAH**
- 3. Surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) **KUNING**
- 4. Surat suara anggota DPRD Provinsi **BIRU**
- 5. Surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota **HIJAU**



Boleh Memilih Apa Saja?

Dalam Pemilu 2024, Pemilih dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

WBP termasuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena menjadi tahanan di rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas), atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

*Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022
Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih*

WBP akan mendapat surat suara berdasarkan domisili berbasis KTP-el yang telah didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).



TPS Khusus

WBP dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi khusus yang telah disiapkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Lapas atau Rutan.

Contoh Kasus

Lokasi TPS Khusus di Lapas Kelas I Bandar Lampung, Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung

Misal ada WBP berasal dari Kecamatan Teluk Betung Utara, sementara lokasi TPS khusus Lapas ini berada di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Maka surat suara yang diterima hanya empat. WBP tidak menerima surat suara DPRD Kabupaten/Kota karena tidak dalam satu Dapil.

Jika WBP berasal dari Kabupaten Lampung Selatan maka hanya mendapat tiga surat suara. WBP tidak menerima Surat Suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena tidak satu Dapil.

Jika WBP berasal dari Kabupaten Lampung Timur maka hanya menerima dua surat suara yaitu surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD. Namun untuk surat suara DPR RI tidak menerima, karena berbeda Dapil.



TOLAK GRATIFIKASI

DALAM BENTUK APAPUN



ATAU LAPORKAN KE
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PUSAT
KEMENKUMHAM



upg.kemenkumham.go.id



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SEMAKIN
PASTI

REFORMASI
HUKUM



PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Keluarga Besar Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Mengucapkan:

*Selamat
Hari Raya Natal*

25 DESEMBER 2023

*dan
Tahun Baru 2024*



AGVIRTA ARMILIA S.
KADIV PELAYANAN
HUKUM DAN HAM

M. IKMAL IDRUS
KADIV
ADMINISTRASI

SORTA DELIMA LUMBAN TOBING
KEPALA
KANTOR WILAYAH

TATO JULIADIN H.
KADIV
KEIMIGRASIAN

R.B. DANANG Y.
KADIV
PEMASYARAKATAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI** **REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**